

Collaborative Governance dalam Program Desa Percontohan Saemaul Undong di Provinsi Yogyakarta, Indonesia

S M Deniar¹

¹ Universitas Muhammadiyah Malang

E-mail: shannazdeniar@umm.ac.id¹

Abstrak. Penelitian ini membahas tentang collaborative governance dalam program Saemaul Undong di Provinsi DI Yogyakarta, Indonesia. Program Saemaul Undong dikenal sebagai *community driven development* yang telah berhasil merubah cara pandang masyarakat pedesaan Korea Selatan. Desa-desa di Korea Selatan memperlihatkan perkembangan dari segi infrastruktur, produksi masyarakat dan juga pola pikir masyarakat menggunakan tiga spirit: *diligence*, *self-help*, dan *cooperation*. Kesuksesan ini kemudian diadopsi oleh pemerintah Korea Selatan melalui model pembangunan pedesaan yang diterapkan di beberapa negara di dunia yang salah satunya adalah Indonesia. Saemaul Undong merupakan hasil Kerjasama sister city antara pemerintah Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbukdo. Penelitian ini akan fokus menjawab pertanyaan mengenai bagaimana bentuk collaborative governance dalam penerapan program Saemaul Undong di Yogyakarta. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Data yang dikumpulkan melalui studi literatur. Teknik Analisa konten digunakan untuk menganalisa data. Peneliti menggunakan konsep collaborative governance dan Kerjasama internasional untuk menjelaskan sinergi keterlibatan sektor public, privat, dan masyarakat dalam Kerjasama pembangunan internasional melalui Saemaul Undong.

Kata kunci: collaborative governance, pembangunan internasional, Saemaul Undong, Indonesia, Korea Selatan

Abstract. This study discusses collaborative governance in the Saemaul Undong program in DI Yogyakarta, Indonesia. The Saemaul Undong program is recognized as a community driven development that has succeeded in changing the perspective of rural South Korean communities. In villages in South Korea, developments in terms of infrastructure, community production and also people's thinking use three spirits: persistence, self-help, and cooperation. This success was later adopted by the South Korean government through a rural development model that was applied in several countries in the world, one of which was Indonesia. Saemaul Undong is the result of a sister city cooperation between the Yogyakarta Special Region government and the Gyeongsangbukdo Province. This study will focus on answering questions about how collaborative governance forms in implementing the Saemaul Undong program in Yogyakarta. This research is a qualitative research. Data collected through literature studies. Content analysis techniques are used to analyse data. Researchers use the concept of collaborative governance and international cooperation to explain the synergy of interactions between the public, private and community sectors in international development cooperation through Saemaul Undong.

Keywords: collaborative governance, international development, Saemaul Undong, Indonesia, South Korea

1. Pendahuluan

Pada dekade terakhir, Korea Selatan lebih dikenal sebagai negara yang berhasil mempromosikan Korean Wave. Namun pada kenyataannya, Korea Selatan juga memiliki prestasi gemilang lainnya, Korea Selatan pernah disebut sebagai *the Miracle of Han River* yang mengacu pada keberhasilan pertumbuhan ekonomi yang begitu pesat. Pasca Perang Korea, nilai produk ekspor tercatat hanya USD 32.82 juta di tahun 1960 kemudian mencapai USD 10 milyar pada tahun 1977, dan tercatat USD 495.4 milyar di tahun 2016. GNI perkapita-pun hanya senilai USD 67 di tahun 1953 namun kini mencapai USD 29.745 di tahun 2017. Korea Selatan telah bertransformasi dari negara penerima bantuan menjadi negara pemberi bantuan luar negeri. Pada tahun 1996 Korea Selatan adalah negara ke 29 yang bergabung dalam OECD dan pada tahun 2010 menjadi anggota *Development Assistance Committee* (DAC) OECD. Tercatat jumlah bantuan luar negeri Korea Selatan yang terbesar adalah ke Asia Tenggara.

Pemimpin Korea Selatan memiliki ketertarikan tersendiri dengan Kawasan Asia Tenggara. Dimulai dari Presiden Lee Myung Bak, Park Geun Hye dan disusul oleh Presiden Moon Jae In yang juga telah mengumumkan kebijakan ‘New Southern Policy’ saat kunjungan luar negeri pertamanya ke Indonesia pada November 2017 [1]. Implementasi kebijakan tersebut bisa kita lihat dalam bentuk kerjasama dan bantuan Korea Selatan kepada Negara-negara berkembang seperti di Asia Tenggara. Program Saemaul Undong telah dilaksanakan di Indonesia, Vietnam, Kamboja, Laos, Myanmar, dan Filipina. Bentuk Kerjasama pembangunan di bawah Program Saemaul Undong kebanyakan merupakan hasil Kerjasama sub-state melalui Sister City Program seperti Kerjasama Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsangbukdo di Gunung Kidul.

Dalam UN Sustainable Development Summit 2015, Park Geun Hye sebagai presiden Korea Selatan mengajukan kerangka paradigma baru dalam hal kerjasama pembangunan internasional dengan memperkenalkan model *community driven development* (CDD) yang disebut dengan *Saemaul Undong* (SMU). Hal tersebut kemudian disusul dengan peluncuran program kerjasama bantuan pembangunan dalam kerangka ODA Korea yang bertujuan untuk memperkenalkan model pembangunan desa ke seluruh dunia. *the Plan for Global Spread of Saemaul Undong* diluncurkan mulai tahun 2016 melalui program-program di bawah KOICA (*Korean International Cooperation Agency*), MAFRA (*Ministry of Agriculture, Food, and Rural Affairs*), RDA (*Rural Development Administration*) dan pemerintah Provinsi Gyeongsangbuk-do. Program-program tersebut melingkupi asistensi pembangunan pedesaan, pengenalan teknologi pertanian, maupun pemberian Pendidikan dan pelatihan bagi penduduk lokal.

Dalam hal asistensi pembangunan pedesaan, Korea Selatan telah memiliki rekam jejak yang cukup gemilang dengan model pembangunan pedesaan milik mereka, yakni Saemaul Undong. Saemaul Undong secara resmi diperkenalkan oleh Presiden Park Chung Hee pada tahun 1970. Kebijakan ini selaras dengan Rencana Pembangunan Ekonomi Lima Tahun Korea Selatan yang dimulai sejak tahun 1962. Rencana pembangunan ini terlihat cukup progresif pada dekade awal dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 10% berkat kebijakan industrialisasi yang dicanangkan oleh Presiden Park. Namun, kondisi yang berbeda diperlihatkan dari sektor *rural development*. Kehidupan masyarakat di desa tidak menunjukkan perbaikan yang signifikan, berakibat pada perbedaan pendapatan yang mencolok antara penduduk kota dan desa. Migrasi ke kota secara besar-besaran muncul dikarenakan kondisi kehidupan yang buruk di desa karena pendapatan yang kecil.

Kesuksesan dari Saemaul Undong ini didukung oleh beberapa factor yakni partisipasi sukarela dari penduduk desa, basic implementasi pembangunan di pedesaan, adanya reward bagi desa yang sukses, pemimpin sebagai motivator dan koordinator, serta dukungan dari pemerintah [2]. Kesuksesan Saemaul Undong merupakan hasil partisipasi dan sinergitas antara pihak-pihak yang terlibat. Dalam program Global Saemaul Undong sendiri, seperti yang sudah dijelaskan di atas persebarannya melalui beberapa saluran misalnya dari program KOICA atau dari pemerintah daerah Korea Selatan yang bekerjasama

langsung dengan pemerintah daerah di negara tujuan. Seperti halnya yang terjadi dengan Kerjasama sister city antara Provinsi DI Yogyakarta dan Provinsi Gyeongsanbukdo yang telah berlangsung sejak tahun 2005 dan telah bekerjasama dalam program pertanian, Pendidikan, budaya, dan olahraga.

Program Saemaul Undong di Yogyakarta diadakan di beberapa desa yakni Desa Ponjong dan Desa Bleberan di Kabupaten Gunung Kidul serta Desas Sumbermulyo di Kabupaten Bantul. Untuk program pengembangan desa, program ini melibatkan Pemerintah DI Yogyakarta, Pemda kabupaten, Bappeda, perangkat desa, kelompok tani, kelompok wanita, dan kelompok masyarakat lainnya; sedangkan dari pihak Korea Selatan ialah pemerintah Provinsi Gyeongsangbukdo yang diwakili oleh YGSI (Yayasan Globalisasi Saemaul Indonesia/ *Saemaul Indonesia Globalization Foundation*).

Dalam praktik collaborative governance dibutuhkan sinergitas dan Kerjasama berbagai aktor yang tidak lagi berpusat pada aktor domain pemerintah namun juga stakeholder yang lain untuk pelaksanaan tata Kelola pemerintahan yang baik. Dalam mencapai collaborative governance dibutuhkan konsensus dalam perumusan dan partisipasi dalam pelaksanaan kebijakan tersebut. Kerjasama internasional dalam Pembangunan Desa melalui Program Saemaul Undong ini melibatkan begitu banyak stakeholders. Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk menganalisis bagaimana bentuk collaborative governance dalam Kerjasama pembangunan internasional melalui Program Saemaul Undong di Provinsi DI Yogyakarta.

2. Tinjauan Pustaka

2.1. Model Pembangunan Desa Saemaul Undong dan Perkembangannya secara Global

Kata Saemaul Undong berasal dari kata 'Sae' yang berarti baru, 'Maul' yang berarti desa, dan 'Undong' adalah gerakan. Secara harfiah Saemaul Undong diartikan sebagai Gerakan Desa Baru (*New Village Movement*) [3]. Saemaul Undong merupakan gerakan yang memfokuskan pada komunitas masyarakat pedesaan dengan tujuan merubahnya menjadi lebih produktif, modern dan berkembang. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa saat pertama kali model ini diperkenalkan oleh Presiden Park Chung Hee tahun 1970, perbedaan kondisi di kota dan desa sangatlah berbeda akibat pembangunan yang tidak merata dampak dari kebijakan industrialisasi yang berorientasi ekspor. Presiden Park percaya bahwa tiga spirit dari Saemaul Undong yakni *diligence*, *self-help*, dan *cooperation* dapat mengatasi masalah yang dihadapi oleh suatu desa. Disparitas ekonomi dapat diminimalisir dengan mengubah mind-set dari masyarakat desa dengan pendekatan-pendekatan yang cocok dengan mereka. Park [4] menjelaskan ada tiga hal yang menarik dalam model Saemaul Undong ini, pertama, revolusi mental, kedua gerakan masyarakat digunakan untuk meningkatkan lingkungan fisik dan sosial, dan yang ketiga, gerakan ini untuk meningkatkan pendapatan dan produktifitas di area pedesaan.

Spirit Diligence, Self-help, dan Cooperation merupakan pondasi yang juga harus didukung oleh metode dan program-program yang mendukung masyarakat pedesaan. Pendidikan Saemaul Undong tercermin dalam program-program pelatihan untuk masyarakat desa. Dari partisipasi masyarakat dalam program Saemaul akan merubah perilaku mereka yang diikuti oleh stimulus, refleksi, resolusi, dan praktik langsung. Perubahan mind set akan membawa efek pada masyarakat desa yakni: (1) *Poverty reduction through rapid increase in household income.* (2) *Access to modern infrastructure and services is delivered in the form of mechanical agriculture, electrification, upgrading of housing, and health, most recently including seasonal farming nurseries.* (3) *Community empowerment through collecting social capital and simultaneous growth in civil society.* (4) *Revitalization of society through young leadership and enacted free status of village social life.* (5) *Elevation of women's role through increasing women's social participation and women's progress in the role of household management.*[3]

Pada international level, Saemaul Undong telah diperkenalkan ke negara-negara berkembang seperti di Afrika dan Asia Tenggara melalui tiga jaringan yakni yang pertama melalui NGO (*Non-Government Organizations*); kedua melalui *Official Development Assistance* melalui KOICA; dan yang ketiga melalui sub-state actor atau pemerintah daerah. Jaringan Saemaul Undong di Korea Selatan bisa ditemui hingga level pedesaan yang terkoordinir di bawah Korea Saemaul Undong Center. Setiap cabang

bekerja secara independent dan memiliki sumber dana mandiri yang berasal dari sumbangan. Kegiatan yang dikoordinir oleh Lembaga ini ialah secara periodic mengundang expertise dan juga tokoh masyarakat dari negara-negara berkembang untuk mengikuti Pelatihan Saemaul Undong baik di Korea maupun di negara tujuan. Selain itu kegiatan mereka juga bergerak di lebih dari 37 desa dari 9 negara. Proyek *overseas* ini meliputi bidang perbaikan dan pembangunan infrastruktur desa, peningkatan pendapatan dari sektor agrikultur, serta capacity building masyarakat pedesaan. Di bawah kendali KOICA, proyek Saemaul Undong diperkenalkan kepada negara-negara partner melalui implementasi program dengan memanfaatkan teknologi menghasilkan rantai nilai yang dapat memperkuat hubungan Kerjasama dalam pembangunan. Proyek percobaan Desa Saemaul Undong pertamakali diluncurkan di Vietnam. Vietnam menjadi contoh kasus sukses dari Saemaul Undong dengan adanya Program serupa yang dicanangkan oleh pemerintah Vietnam, Nong Thon Moi pada tahun 2010 yang memperlihatkan sejumlah kesamaan antara keduanya dan menjadi alasan mengapa pengalaman dari Saemaul Undong sangat berarti bagi program nasional di Vietnam [4]. Pada perkembangannya proyek Saemaul Undong KOICA ini telah tersebar di Kawasan Afrika dan Asia Tenggara. Sementara itu, banyak proyek Saemaul Undong yang dicanangkan di bawah Kerjasama antar pemerintah daerah seperti yang dilakukan oleh Provinsi Gyeongsanbukdo dan Provinsi DI Yogyakarta di bawah Kerjasama Sister City kedua daerah. Pemerintah provinsi Gyeongsanbukdo memang terlihat aktif dalam program Global Saemaul Undong. Provinsi ini dikenal sebagai pusat kegiatan Saemaul Undong di tahun 1970an serta merupakan asal dari Presiden Park Chung Hee, sang inisiator yang lahir di Kota Gumi. Pada tahun 2001, Provinsi Gyeongsanbukdo melakukan Kerjasama program Saemaul Undong pertamanya dengan Vietnam.

2.2. Collaborative Governance

Collaborative governance atau dalam Bahasa Indonesia disebut dengan tata Kelola kolaboratif dikenal dengan partisipasi kolektif antara public sektor dan private sektor dalam proses pengambilan keputusan. Kolaborasi di sini diartikan berbeda dengan jaringan (network) atau kemitraan (partnership). Kemudian governance atau disebut dengan tata Kelola pemerintahan yang baik merujuk pada efisiensi atau hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang lebih baik. Pergeseran *government* ke *governance* lebih memperluas pada makna yang dimaksud yakni pada pengertian *government* atau institusi pemerintah yang membuat kebijakan sedangkan *governance* merujuk pada keterlibatan NGO, kelompok kepentingan dan masyarakat atau actor lain yang disamping institusi pemerintah dalam sebuah kebijakan public [5]. Ansell dan Gash [6] memberikan definisi collaborative governance sebagai: “A governing arrangement where one or more public agencies directly engage non-state stakeholders in a collective decision-making process that is formal, consensus-oriented, and deliberative and that aims to make or implement public policy or manage public programs or assets.”

Bisa dibilang collaborative governance merupakan forum yang diinisiasi oleh badan public dengan melibatkan partisipasi sektor private atau non-negara yang terlibat langsung dalam sebuah proses pengambilan keputusan. Para aktor-aktor yang terlibat juga memiliki forum yang dibentuk secara formal dan pertemuannya dilakukan secara kolektif. Kolaborasi ini pada dasarnya harus menyiratkan komunikasi dua arah antar partisipan dalam membuat keputusan berdasarkan consensus. Semua pemangku kepentingan memiliki peluang dan terbuka aksesnya untuk bertemu Bersama dalam sebuah proses musyawarah yang menghasilkan suatu kebijakan public atau manajemen public. Dengan kata lain, prosesnya harus bersifat kolektif. Ada beberapa variabel yang menentukan sebuah collaborative governance ini berjalan baik atau tidak yakni sejarah konflik atau Kerjasama sebelumnya, insentif dari para pemangku kepentingan untuk berpartisipasi, perimbangan kekuasaan dan sumber daya, kepemimpinan, dan desain kelembagaan [6]. Dalam collaborative governance diperlukan juga factor-faktor yang membangun kepercayaan serta komitmen dari partisipasi pihak-pihak yang bekerjasama.

Dalam Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menjelaskan tentang pembangunan Kawasan Pedesaan yang diharapkan dapat mensinergikan dua fungsi yakni *self-government community* dengan *local self-government*. Pembangunan Kawasan Pedesaan diharapkan dapat mempercepat dan

meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa melalui pendekatan pembangunan partisipatif [7]. Permasalahan yang sering menghambat dalam proses Pembangunan desa biasanya terletak pada sistem konteks yang berlapis mulai dari politik, hukum, sosial ekonomi, dan lingkungan yang berpengaruh pada perundangan atau legislasi yang rumit, kedua pada konteks leadership yang mempengaruhi perencanaan pembangunan dan yang terakhir yakni kondisi ego sectoral. Collaborative governances dinilai mampu memaksimalkan potensi keterlibatan berbagai pihak dalam pembangunan Kawasan pedesaan.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif dijelaskan sebagai proses pemahaman fenomena sosial dengan mendeskripsikan secara holistic ke dalam kata-kata untuk menyampaikan informasi dan menuliskannya ke dalam tulisan ilmiah [8]. Penelitian kualitatif berdasarkan metodologi penyelidikan yang mengeksplorasi masalah sosial. Secara umum, penelitian ini mencoba membangun gambaran yang kompleks dan holistic, menganalisisnya dengan kata-kata, melihat pandangan terperinci dari informan, dan melakukan penelitian dengan alami. Metode ini berusaha untuk mencari jawaban dengan mengumpulkan bukti-bukti, dan membuat sebuah kesimpulan.

Pada penelitian ini, menggunakan penelitian kualitatif karena data-datanya berupa penjelasan dan tidak menggunakan Analisa secara statistic. Pendekatan studi kasus dipilih karena pendekatan ini memberikan deskripsi yang komprehensif terhadap suatu peristiwa, aktivitas, dan proses dengan lebih dalam dan deskriptif. Pendekatan studi kasus harus memilih suatu peristiwa yang menarik dan tidak biasa dan menjelaskan sebuah fenomena [9]. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana bentuk collaborative governance dalam program Kerjasama pembangunan Saemaul Undong di Provinsi DI Yogyakarta.

Menurut Lamont [10], proses pengumpulan data penelitian kualitatif dalam studi hubungan internasional meliputi wawancara, fokus grup, penelitian berbasis internet dan penelitian berbasis dokumen atau arsip. Berdasarkan penjelasan ini, metode pengumpulan data dalam penelitian ini mencakup penelitian berbasis dokumen atau arsip yang disebut juga studi literature. Data primer didapatkan dari pernyataan dan dokumen resmi dari pemerintah Korea Selatan dan pemerintah penerima bantuan melalui website resmi seperti *KOICA*, *ECDF*, Yayasan Global Saemaul Undong, kemudian dari Indonesia yakni pemerintah pusat melalui Bappenas, Bappeda, pemerintah provinsi DI Yogyakarta. Sedangkan data sekunder didapatkan dari pemberitaan media massa.

Dalam penelitian ini, data dianalisa dengan metode analisis konten atau analisis isi. Analisa konten dilakukan untuk mengungkapkan isi yang menggambarkan situasi. Proses ini dilakukan dengan kategorisasi dan pengkodean [10]. Prosedur Analisa dilakukan dengan menseleksi bacaan yang akan diselidiki, menyusun item-item yang spesifik tentang isi yang akan diselidiki sebagai alat pengumpul data, dan menyetengahkan kesimpulan sebagai hasil analisa [11].

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Global Saemaul Undong sebagai Solusi Alternatif Pembangunan Desa

Penggunaan *good governance* atau tata Kelola pemerintahan yang baik menjadi strategi yang ditekankan dalam pembangunan internasional setelah dekade 2000an dikarenakan kinerja pembangunan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan yang sebelumnya dianggap tidak cukup memadai [12]. Institusi negara dan pasar yang tidak efektif dan efisien di negara berkembang dianggap menjadi hambatan dalam pembangunan. Dengan Good governance yang didasari oleh kepercayaan dan sinergitas dari seluruh actor dan *stakeholders* yang terlibat akan berjalan dengan efektif. Lebih dari 189 pemimpin negara berkomitmen dalam Millenium Development Goals pada tahun 2000 yang bertujuan untuk mengurangi angka kemiskinan dunia dengan strategi utama, good governance. Namun setelah 15 tahun implementasinya, MDGs memperlihatkan hasil kurang memuaskan dengan hasil yang tidak sama di berbagai belahan dunia. Negara-negara di Afrika dan Sebagian Asia Tenggara tidak memperlihatkan

progress yang signifikan. Alternatif strategi pemberantasan kemiskinan di negara berkembang terus dikaji ulang. Korea Selatan muncul dengan paradigma baru melalui program Global Saemaul Undong yang pertamakalinya diajukan dalam UN Sustainable Development Summit pada tahun 2015. Saemaul Undong menjadi salah satu Gerakan masyarakat yang bisa dibilang sukses untuk menggerakkan partisipasi masyarakat untuk bekerja Bersama-sama mengurangi kemiskinan yang terkadang menjadi penghambat atau cenderung hilang dalam program-program pembangunan. Itulah yang menjadi slogan utama Korea Selatan saat mempromosikan Saemaul Undong.

Kesuksesan Saemaul Undong tidak bisa dilepaskan dari peran serta sinergi dari keterlibatan pemerintah, kelompok kepentingan, dan juga masyarakat. Presiden Park Chung Hee saat melakukan kampanye Saemaul Undong pernah berkata bahwa, *“Saemaul Undong embodies our efforts to improve and modernize our villages by ourselves in the spirit of self-help and independence. The government has launched the national campaign in the firm belief that it would turn every village in Korea into a prosperous and comfortable place to live in[13]”* Program ini bukan hanya pada perbaikan kondisi individu tapi juga pada peningkatan kondisi kehidupan masyarakat secara keseluruhan memperlihatkan bahwa Saemaul Undong bukan hanya sebuah gerakan masyarakat biasa namun juga merupakan kebijakan negara untuk pembangunan ekonomi dan juga pengentasan kemiskinan.

Saemaul Undong diluncurkan pada tahun 1970 dengan tiga prinsip yang diperkenalkan oleh Presiden Park Chung Hee dihadapan penduduk desa yang Ia temui, *“We need to support ourselves to develop our villages. With aspirations of self-help, self-reliance and cooperation, we can make our village rich and turn it into a good place to live”*. Pernyataan tersebut menekankan bahwa masyarakat desa tidak seharusnya hanya mengharapkan bantuan dari negara namun mereka harus mengubah dan membantu mereka sendiri (*self-help*). Swadaya masyarakat merupakan kunci dari ide Saemaul Undong yang kemudian diperluas ke kemandirian (*self-reliance*) dan Kerjasama (*cooperation*). Demi kehidupan desa mereka sendiri, warga harus menyumbangkan tenaga dan sumber daya untuk kepentingan bersama. Dukungan yang signifikan diperlihatkan oleh masyarakat desa dalam implementasi program ini pada awal 1970an. Pemerintah hanya sebagai pendukung dengan memberi bantuan bahan mentah ataupun subsidi. Pejabat daerah berperan menjadi katalisator dengan mendukung Saemaul Undong dengan antusias. Partisipasi sukarela dari masyarakat sendiri di tingkat akar rumput ini memungkinkan prospek perubahan kualitas kehidupan masyarakat desa yang lebih baik. *Land reform* yang terjadi pasca kemerdekaan dari 1946 hingga 1955 membuahkan hasil apalagi didukung dengan program Saemaul Undong yang memungkinkan pemilik tanah untuk memanfaatkan tanah mereka. Para petani memperlihatkan peningkatan produktifitas pertaniannya dari hasil modernisasi infrastruktur desa yang berimbas pula pada perbaikan pendidikan di desa. Angka partisipasi Pendidikan oleh anak usia sekolah di pedesaan melonjak cukup tinggi setelah adanya peningkatan produksi desa. Hal ini berimbas pada penguatan sumber daya manusia pedesaan yang terlihat pada arus urbanisasi di tahun 1970-an. Orang pedesaan pindah ke kota untuk mengisi tenaga kerja di sektor industry.

Apa yang dilakukan oleh masyarakat pedesaan didukung dan diintegrasikan dengan tujuan pemerintah saat itu yakni mengurangi angka kemiskinan. Masyarakat pedesaanlah yang melakukan inisiasi kemudian hal ini didukung oleh pemerintah dengan memberikan bantuan material. Pemerintah desa dibantu dengan pimpinan desa atau yang disebut dengan Saemaul Leader, orang-orang yang dipercaya dan diberi tanggung jawab untuk memimpin kegiatan Saemaul di desa-desa; memberikan bantuan dan dorongan semangat kepada masyarakat kemudian pemerintah akan memberikan reward atau hadiah kepada desa yang berhasil. Sebagai model pembangunan masyarakat dan nasional, gerakan Saemaul telah diadvokasi sebagai model pengentasan kemiskinan dan kemakmuran global [14]. Meski banyak factor dibalik kesuksesan pembangunan ekonomi Korea Selatan, Saemaul Undong dipandang menjadi kunci keberhasilan tersebut [14]. Pengakuan terhadap Saemaul Undong sebagai alternative pembangunan pedesaan disampaikan oleh Asian Development Bank bahwa Saemaul Development Movement penting untuk peningkatan pendapatan, pengentasan kemiskinan terutama memperlihatkan pentingnya peran wanita sebagai key actors dalam pembangunan ekonomi dan sosial [15]. Pengakuan

tersebut juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon dan juga Jeffrey Sachs saat melihat proyek-proyek Saemaul Undong mulai digalakkan di Kawasan Afrika.

4.2. Saemaul Undong di Provinsi DI Yogyakarta

Section Korea Selatan dan Indonesia meresmikan hubungan diplomatiknya pada 17 September 1973. Sejauh ini hubungan keduanya didasari oleh komplementaritas sumber daya dan keunggulan dari masing-masing pihak. Secara khusus, Kerjasama antara Indonesia dan Korea Selatan ini juga dijalani oleh sub-state actor yakni melalui Kerjasama antar kota atau provinsi. Menurut data dari Kemlu, terdapat 22 kerjasama antar provinsi di Indonesia dengan provinsi di Korea Selatan dengan 14 kerjasama sister city dan delapan Kerjasama yang berbentuk friendship. Provinsi DI Yogyakarta meresmikan kerjasamanya dengan Provinsi Gyeongsangbukdo pada tahun 2001. Inisiasi ini datang dari pemerintah Gyeongsangbukdo yang kemudian dilanjutkan dengan penandatanganan Letter of Intent (LoI) pada tahun 2003 dan dilanjutkan dengan Memorandum of Understanding pada tahun 2005 di Yogyakarta. Inisiasi Kerjasama dalam bidang pembangunan desa datang dari kunjungan Duta Besar Korea Selatan untuk Indonesia yang disambut baik oleh Menteri KPDT (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi), Marwan Jafar yang kemudian ditindaklanjuti dalam penandatanganan MoU pada Agustus 2015. Bentuk Kerjasama pembangunan desa melalui Saemaul Undong ini kemudian ditindaklanjuti pada tahun 2015 oleh Gubernur DI Yogyakarta Sri Sultan HB X. Beliau menilai bahwa karakteristik dari Saemaul Undong ini cukup mampu untuk diadopsi oleh masyarakat desa di Yogyakarta untuk peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat desa (Giyanto, 2015).

Dukungan terhadap program Desa Percontohan Saemaul Undong di Yogyakarta juga terlihat pada pembentukan Pusat Studi Trisakti Saemaul Undong di Universitas Gadjah Mada pada tahun 2015. Pusat studi ini diresmikan langsung oleh Gubernur Gyeongsangbukdo, Kim Kwan Yong dan Gubernur Yogyakarta, Sri Sultan HB X. Nilai-nilai Tri Sakti yang dirumuskan oleh Presiden Soekarno untuk mewujudkan kedaulatan politik, berdikari dalam ekonomi dan berbudaya dengan nilai gotong royong, kemandirian, dan ketekunan dari Saemaul Undong yang dicanangkan Presiden Park Chung Hee dapat ditelaah melalui kajian dan penelitian yang bermanfaat bagi pengembangan kesejahteraan pedesaan.

Pengelolaan program Saemaul Undong di Indonesia dilaksanakan oleh *Saemaul Globalization Foundation* (SGF) atau Yayasan Global Saemaul Undong Indonesia (YGSI) mulai dari proses pembentukan kerja sama, pengelolaan dana, implementasi hingga evaluasi dan monitoring di desa percontohan Saemaul Undong. Tujuan dari YGSI ini ialah pemberdayaan masyarakat dengan memupuk Kembali kesadaran masyarakat untuk bergotong royong sehingga dapat menghasilkan kemandirian dan lepas dari ketergantungan pada pemerintah. Program Saemaul Undong ini mendapat respon yang cukup baik dari pemerintah desa dan masyarakat desa. Melihat hubungan yang cukup baik antara pemerintah dan masyarakat dalam pembangunan desa, partisipasi masyarakat dalam program Saemaul Undong ini juga sangat antusias mulai dari tahap perencanaan hingga pengimplementasian program [16]. YGSI memiliki roadmap pembangunan lima tahun (2015-2020) untuk semua desa namun disesuaikan dengan potensi desa yang dimiliki. Menurut YGSI, pada tahun pertama difokuskan pada peningkatan kapasitas SDM dan motivasi masyarakat; tahun kedua peningkatan kapasitas BUMDes (Badan Usaha Milik Desa); tahun ketiga pengembangan ekonomi dan pemberdayaan peran perempuan; tahun keempat dan kelima infrastruktur dan kemandirian desa.

Dalam pengimplementasian program Saemaul, Desa percontohan memiliki pendamping di dalam negeri. YGSI menunjuk Yayasan Penabulu sebagai NGO lokal sebagai pendamping dan juga pelaksana program. Yayasan Penabulu berperan dalam penyeleksian calon desa percontohan dengan melihat organisasi masyarakat yang aktif di dalam desa serta desa yang memiliki BUMDes yang bisa dimanfaatkan untuk kemandirian dan keberlanjutan. Yayasan Penabulu menawarkan sejumlah desa potensial yang memiliki kriteria seperti angka kemiskinan, akses, dan potensi SDM dan SDA desa. Menurut Sri Purwani salah satu koordinator Yayasan Penabulu, pemilihan desa percontohan akhirnya diputuskan oleh YGSI kepada desa-desa yang memiliki Riwayat keberhasilan dalam bekerjasama dengan Lembaga lain karena mereka telah memiliki kelayakan yang cukup. Pihak YGSI juga memberikan

volunteer dari Korea Selatan untuk ditempatkan di masing-masing desa percontohan. Akhirnya terpilih tiga desa yakni Desa Bleberan dan Desa Ponjong di Kabupaten Gunung Kidul serta Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul.

Tiga desa di Yogyakarta, yakni Desa Bleberan, Desa Ponjong, dan Desa Sumbermulyo dijadikan target untuk penerapan Desa Percontohan Saemaul Undong. Pemilihan desa didasari oleh banyak pertimbangan seperti kesiapan dari desa, potensi sumber daya alam yang dimiliki, budaya lokal, dan kemampuan pemerintah desa. Sebagai contoh, Desa Bleberan dan Desa Ponjong dipilih karena keduanya merupakan desa percontohan di Kabupaten Gunung Kidul dan nilai-nilai masyarakat desa yang masih menjunjung tinggi nilai gotong royong, tolong menolong dan semangat kebersamaan [16]. Berbeda dari dua desa di Gunung Kidul ini, Desa Sumbermulyo di Kabupaten Bantul hanya berjalan dua tahun dari target lima tahun program. Menurut Laporan Desa Sumbermulyo [17], desa ini dianggap telah dapat mengembangkan desa secara swasembada sehingga program Saemaul Undong hanya berjalan dua tahun yakni 2015-2017.

Table 1. Identifikasi aktor dalam desa percontohan Saemaul Undong di Yogyakarta.

	Indonesia	Korea Selatan
Pemerintah	Kementerian KPDT	KOICA, Kedutaan Besar Korea Selatan
Pemerintah Daerah	Pemda DI Yogyakarta	Pemerintah Gyeongsanbukdo
Lembaga Swadaya	Yayasan Penabulu Desa Lestari, Pusat Studi Trisakti Saemaul Undong	Saemaul Globalization Foundation (SGF)/ Yayasan Global Saemaul Undong Indonesia (YGSI)
Kelompok Masyarakat	Masyarakat desa di Yogyakarta yang masuk dalam Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LKMD	

Sebagai wilayah yang menjadi lokasi penerapan desa percontohan Saemaul Undong, pemerintah provinsi Yogyakarta memiliki peran dalam pendampingan dan pengawasan serta membuka akses konsultasi mengenai hal-hal yang dibutuhkan oleh pemerintah desa [18]. Peran pemerintah desa juga penting dalam Menyusun strategi dan framework implementasi dan misi dalam RPJMDesa. Pemerintah desa lebih mengenal mengenai potensi, peluang, dan tantangan dari tiap desa, untuk itu mereka diikutsertakan dalam proses perumusan kebijakan. Dalam proses ini, penentuan program dibahas Bersama dengan YGSI, Yayasan Penabulu, Pemerintah Desa dan juga masyarakat yang terdiri dari perwakilan kelompok masyarakat seperti Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), Kelompok Wanita Tani (KWT), Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), LKMD. Sebagai pihak donor, YGSI tetap melibatkan masyarakat dalam proses perencanaan hingga pengimplementasian program. Pemerintah desa Bleberan misalnya sangat rutin melaksanakan rapat bulanan yang dihadiri oleh YGSI dan kelompok masyarakat untuk evaluasi program dan menemukan solusi dalam permasalahan yang ditemui.



Gambar 1. Pengimplementasian Saemaul Undong di Desa Bleberan

Partisipasi masyarakat dalam implementasi program Saemaul Undong sangat penting karena dengan begitu akan menimbulkan rasa memiliki sehingga program ini akan berjalan secara berlanjut kedepannya. Bagi YGSI, pengetahuan desa mengenai apa itu Saemaul Undong dan YGSI menjadi penting karena dengan begitu partisipasi masyarakat dalam implementasi program ini dapat diukur. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Puspitasari, et all [16] mengenai partisipasi masyarakat di Desa Bleberan, mayoritas masyarakat desa mengetahui tentang YGSI dari pemerintah desa setempat. Lebih lanjut, Mengenai pengetahuan masyarakat akan program dari YGSI tidak semua memiliki pemahaman mengenai pelaksanaan program. Namun secara garis besar masyarakat sangat antusias dengan program-program Saemaul Undong ini dan terlihat adanya peningkatan partisipasi masyarakat dalam usaha pembangunan desa.

Berbeda dari dua desa di Gunung Kidul, dalam proyek lima tahun desa percontohan Saemaul Undong, Program di Desa Sumbermulyo dihentikan setelah program itu dilaksanakan baru dua tahun. Menurut Laporan Desa Sumbermulyo [17], desa ini dianggap telah dapat mengembangkan desa secara swasembada sehingga program Saemaul Undong hanya berjalan dua tahun yakni 2015-2017. Namun menurut sumber lainnya, perbedaan persepsi dari berbagai belah pihak yang menjadi alasan mengapa program ini dihentikan. Menurut YGSI, Desa Sumbermulyo telah mampu berdiri dan berkembang sendiri tanpa bantuan YGSI. Secara historis, desa ini telah banyak mendapat bantuan dari berbagai pihak seperti pemerintah dan Lembaga swadaya masyarakat lainnya akibat desa ini menjadi korban dampak gempa bumi tahun 2006; YGSI menganggap bahwa dengan banyaknya bantuan dari berbagai pihak inilah yang memberi kesan bahwa masyarakat bermental mencari bantuan [17]. Berbeda dengan Desa Sumbermulyo, implementasi program di Desa Ponjong dan Desa Bleberan tetap sesuai dengan target yakni berlangsung selama lima tahun. Di desa Bleberan

Monitoring dan evaluasi dilakukan secara berkala oleh YGSI dan Pemerintah desa setempat yang bersifat reflektif dan partisipatif. Monitoring dan evaluasi diadakan setahun sekali karena fokus program Saemaul Undong ini berbeda tiap tahunnya. Pada kegiatan monitoring dan evaluasi, dihadiri oleh YGSI, Yayasan Penabulu, dan juga seluruh perwakilan dari tiap desa. Kegiatan ini melibatkan pemerintah desa, masyarakat desa, pemerintah daerah, serta dari perguruan tinggi yakni dari Pusat Studi Trisakti Saemaul Undong.

4.3. Sinergi Collaborative Governance dalam Saemaul Undong di Yogyakarta

Dalam Kerjasama pembangunan melalui desa percontohan Saemaul Undong ini, peneliti menggunakan empat nilai dasar collaborative governance yang disimpulkan oleh Ni Luh Yulyana Dewi [5], Nilai dasar

dari collaborative governance terbagi menjadi empat nilai yakni menitikberatkan pada consensus dalam pembuatan keputusan, kepemimpinan yang bersifat kolektif dan terstruktur, komunikasi yang terjalin multiarah, dan terakhir pembagian sumber daya dalam proses. Ia menjelaskan bahwa empat nilai ini merupakan satu kesatuan yang terintegrasi satu sama lainnya.

Orientasi konsensus dimaksudkan pada komitmen para stakeholders yang mana akan menghasilkan pada sebuah keputusan yang dibuat berdasarkan pada consensus atau kepentingan Bersama. Inisiasi Kerjasama pembangunan melalui Desa Percontohan Saemaul Undong datang dari pihak Korea Selatan melalui Duta Besarnya yang kemudian disambut baik oleh Kementerian KPDT kemudian usaha ini dilanjutkan dengan penunjukan tiga desa percontohan di Yogyakarta. Pemerintah provinsi Yogyakarta menyambut baik dengan mendukung penuh pelaksanaan program didaerahnya. Komitmen tinggi ditunjukkan oleh YGSI sebagai perpanjangan pemerintah Korea Selatan memperlihatkan dukungan dan komitmen kerja yang maksimal mulai dari proses asesmen hingga monitoring.

Dalam struktur kelembagaan, tiap stakeholders memiliki peran dan tugasnya masing-masing. Aksi Bersama ditunjukkan dalam setiap program yang dilakukan. Dalam wawancara dengan YGSI, memang realisasi program ini merupakan kebijakan yang mengarah pada top down coordination, namun mereka berpendapat bahwa bentuk ini diharapkan dapat memunculkan semangat masyarakat yang sifatnya bottom-up dari masyarakat. Penempatan coordinator atau ketua program juga disusun menyesuaikan kebutuhan dari masing-masing daerah pemberdayaan masyarakat dengan melihat bagaimana kompetensi dari coordinator tersebut yang dilakukan dengan pelatihan-pelatihan sebelumnya. Gerakan Saemaul Undong memberikan pengalaman-pengalaman yang bersifat sangat teknis dari adaptasi kesuksesan pembangunan di Korea Selatan [19] terbukti dengan penempatan struktur-struktur ini dapat dipraktikkan secara langsung di negara berkembang seperti Indonesia.

Komunikasi menjadi alat yang penting dalam tercapainya kolaborasi yang baik. Komunikasi akan menghadirkan umpan balik dari pihak-pihak yang terlibat. Dalam collaborative governance idealnya ada tiga pihak yang saling berkoordinasi dan berkomunikasi yakni pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam kasus ini, pemerintah desa melalui perangkat desa dan unit BUMDes sangat mendukung semua proses kegiatan. Pemerintah desa sangat kooperatif dan membantu terlaksananya program misalnya saja dengan menyediakan ruangan untuk bekerja di Balai Desa sehingga koordinasi komunikasi dengan warga bisa terjalin. Dari pihak YGSI juga terlibat aktif dalam koordinasi program dengan coordinator di lapangan. Masyarakat juga berpartisipasi dalam setiap program. Proses monitoring dan evaluasi yang dilakukan melalui rapat-rapat yang dihadiri semua pihak menjembatani upaya membangun solidaritas, sinergi dan saling pengertian.

Pembagian sumber daya disini dimaksudkan yakni sumber daya alam dan sumber daya keuangan dan juga sumber-sumber lain yang digunakan dalam kegiatan kolaborasi. Untuk desa percontohan Saemaul, 80% sumber dana berasal dari YGSI sementara 20% lainnya berasal dari desa. Anggaran yang terbesar adalah untuk program perbaikan infrastruktur. Sebagai contoh di Desa percontohan telah dibangun Gedung pertemuan yang bertujuan untuk tempat aktivitas dan berkumpul warga, kemudian pengerasan jalan di Desa Bleberan dan Desa Ponjong karena desa ini membutuhkan akses transportasi untuk memudahkan aktivitas perekonomian warga.

5. Kesimpulan

Saemaul Undong nampak dinarasikan oleh Korea Selatan sebagai pendekatan “one size fit all” yang universal. Namun patut dicermati bahwa model Saemaul Undong ini lahir dari pemerintahan yang otoriter di bawah Presiden Park Chung Hee. Sehingga dalam pengaplikasiannya perlu kecermatan dengan melihat konteks lokal dan intervensi dari aktor-aktor yang terlibat. Collaborative Governance tercetus dari upaya menghilangkan kompleksitas hubungan antar aktor yang terlibat dalam suatu kebijakan. Program Desa Percontohan Saemaul Undong di Yogyakarta ini merupakan salah satu studi kasus yang bisa dicermati sebagai satu bentuk collaborative governance dari aktor-aktor yang terlibat. Pemerintah pusat dalam hal ini Indonesia dan Korea Selatan bekerjasama dalam framework pembangunan internasional yang

diupayakan melalui pembangunan pemberdayaan desa dengan melihat aspek dan nilai-nilai baik dari Saemaul Undong yang pernah mencatat prestasi yang baik pada masyarakat pedesaan Korea Selatan. Yayasan Saemaul Global Indonesia bekerjasama dengan Yayasan Penabulu sebagai perpanjangan pemerintah bertanggungjawab dalam mengkoordinir dan mengawasi jalannya program dari proses asesmen hingga evaluasi. Pemerintah Desa dan kelompok masyarakat di desa juga menunjukkan partisipasinya dalam setiap program.

6. Ucapan Terima Kasih

Penulis ingin mengucapkan terima kasih atas bantuan atau dorongan dari civitas academia dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Malang.

7. Referensi

- [1] C. P. Hoo, "A View from Southeast Asia on South Korea.," *Asan Forum*, vol. 9, no. 2, Apr. 2019, [Online]. Available: <http://www.theasanforum.org/a-view-from-southeast-asia-on-south-korea/>.
- [2] M. Douglass, "The Saemaul Undong in Historical Perspective and in the Contemporary World," in *Learning from the South Korean Developmental Success*, I. Yi and T. Mkandawire, Eds. London: Palgrave Macmillan UK, 2014, pp. 136–171.
- [3] K. M. Kim, "The Value Of Saemaul Undong: South Korea Community Character Booster," *Vidyottama Sanatana Int. J. Hindu Sci. Relig.*, vol. 1, no. 1, pp. 46–52, 2017.
- [4] S. Park, "Analysis of Saemaul Undong: a Korean rural development programme in the 1970s," *Asia-Pac. Dev. J.*, vol. 16, no. 2, pp. 113–140, Jun. 2012, doi: 10.18356/3898e112-en.
- [5] N. N. Luan, "Study Korea's experiences on community and rural development to apply for Nong Thon Moi in Vietnam." Korea Rural Economic Institute, 2017, [Online]. Available: <https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiV-YDSi6PvAhUPT30KHeDIC78QFjAAegQIARAD&url=https%3A%2F%2Fwww.krei.re.kr%2Feng%2FdownloadBbsFile.do%3FatchmnfIno%3D28027&usg=AOvVaw1-hoTYaw4vhEsnN8ouuPcq>.
- [6] N. L. Y. Dewi, "DINAMIKA COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM STUDI KEBIJAKAN PUBLIK," *J. Ilm. Din. Sos.*, vol. 3, no. 2, p. 200, Oct. 2019, doi: 10.38043/jids.v3i2.2188.
- [7] C. Ansell and A. Gash, "Collaborative Governance in Theory and Practice," *J. Public Adm. Res. Theory*, vol. 18, no. 4, pp. 543–571, Oct. 2007, doi: 10.1093/jopart/mum032.
- [8] R. Febrian, "COLLABORATIVE GOVERNANCEDALAM PEMBANGUNAN KAWASAN PERDESAAN(Tinjauan Konsep dan Regulasi)," *WEDANA J. Pemerintah. Polit. Dan Birokrasi*, vol. 2, no. 1, pp. 200–208, Oktober 2016.
- [9] U. Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, V. Refika Aditama, 2017.
- [10] A. B. Starman, "The case study as a type of qualitative research.," *J. Contemp. Educ. Stud. Sodob. Pedagog.*, vol. 64, no. 1, pp. 28–43, Mar. 2013.
- [11] C. K. Lamont, *Research methods in international relations*, 1st edition. Los Angeles: Sage, 2015.
- [12] Hadari Nawawi, *Metode penelitian bidang sosial*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993.
- [13] M. S. Grindle, "Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries," *Governance*, vol. 17, no. 4, pp. 525–548, Oct. 2004, doi: 10.1111/j.0952-1895.2004.00256.x.
- [14] Rho, Wha-Joon, "Triple Helix for Social Innovation: The Saemaul Undong for Eradicating Poverty," *J. Contemp. East. Asia*, vol. 13, no. 1, pp. 39–55, May 2014, doi: 10.17477/JCEA.2014.13.1.039.

- [15] O. C. Choi, "Saemaul Development and Global Saemaul Undong for Community Development.," in *ROUTLEDGE HANDBOOK OF COMMUNITY DEVELOPMENT: perspectives from around the globe.*, Place of publication not identified: ROUTLEDGE, 2019.
- [16] O. C. Choi, "The Role of Community-Based Organizations: The Case of the Saemaul Undong Women's Club," in *Handbook of Community Well-Being Research*, C. Wong, Ed. Heidelberg: Springer, 2017.
- [17] D. C. Puspitasari, R. Satriani, and S. B. Pmungkas, "PENGEMBANGAN KAPASITAS MASYARAKAT PARTISIPATIF: STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM SAEMAUL UNDONG DI KABUPATEN GUNUNG KIDUL DIY," *J. Sociol. Pendidik. Humanis*, vol. 4, no. 1, p. 1, Aug. 2019, doi: 10.17977/um021v4i1p1-13.
- [18] R. A. Agustiana, "Kerjasama Indonesia-Korea Selatan Dalam Pembangunan Desa Melalui Program Saemaul Undong (Studi Kasus Desa Sumbermulyo, Bantul)," Universitas Pertamina, Jakarta, 2020.
- [19] D. A. Saraswati, "IMPLEMENTASI KONSEP SAEMAUL UNDONG KOREA SELATAN DALAM UPAYA PEMBANGUNAN DESA BLEBERAN, KECAMATAN PLAYEN, KABUPATEN GUNUNG KIDUL, DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA," Universitas Negeri Surakarta, Solo, 2017.
- [20] J. Doucette and A. R. Müller, "Exporting the Saemaul spirit: South Korea's Knowledge Sharing Program and the 'rendering technical' of Korean development," *Geoforum*, vol. 75, pp. 29–39, Oct. 2016, doi: 10.1016/j.geoforum.2016.06.018.